

Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)

**Harris
Topowijono
Sri Sulasmiyati**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
harristetap@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Self Assessment System which is represented by the amount of Tax Payment Slip of Income Tax submitted and Periodic Tax Return of Income Tax reported, Tax Audit as represented by the amount of Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter against the Income Tax Revenue either simultaneously or partially. The explanatory research is a type of research that is selected in this study. The research data is secondary data, which is the amount of monthly Payment Slip of Income Tax submitted and Periodic Tax Return of Income Tax reported, Tax Audit as represented by the amount of Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter, and Income Tax Revenue for 36 months. Statistical analysis Descriptive and inferential statistical analysis is a method of data analysis used in this study. Here are the results obtained from this study: (1) the amount of Tax Payment Slip of Income Tax submitted, Periodic Tax Return of Income Tax reported, Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter has significant effect on income tax revenues simultaneously. (2) the amount of Tax Payment Slip of Income Tax submitted, Periodic Tax Return of Income Tax reported has significant effect on the amount of income tax revenue partially, while the amount of Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter doesn't have significant effect on income tax receipts partially.

Key word: *Self Assessment System, Tax Payment Slip of Income Tax, Periodic Tax Return of Income Tax, Tax Audit, Underpayment Tax Assessment Letter, Added Underpayment Tax Assessment Letter, Income Tax Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar *Self Assessment System* yang diwujudkan dalam jumlah SSP dan jumlah SPT serta pemeriksaan pajak yang diwujudkan dalam jumlah SKPKB dan SKPKBT dapat mempengaruhi penerimaan PPh baik secara simultan maupun parsial. Penelitian penjelasan merupakan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Data penelitian merupakan data sekunder berupa data tiap bulan dari jumlah SSP, SPT, SKPKB dan SKPKBT serta penerimaan PPh selama 36 bulan. Analisis statistik deskriptif serta analisis statistik inferensial adalah metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari penelitian ini: (1) Jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara simultan. (2) Jumlah SSP, jumlah SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial, sementara jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial.

Kata kunci: *Self Assessment System, SSP PPh, SPT PPh, Pemeriksaan Pajak, SKPKB, SKPKBT, Penerimaan PPh*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya terdapat perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula berbentuk *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Berdasarkan data dari komposisi penerimaan dalam negeri sebelum dan sesudah

dilakukannya reformasi pajak maka terdapat perbedaan yang cukup besar. Tahun 1980an sektor perpajakan menyumbang 36,9% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2000an perpajakan menyumbang 68,2%.

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) mempunyai hak dalam melaporkan,

menghitung maupun menyetor sendiri banyaknya pajak yang harus dibayarkan (Rahayu, 2010:101). Sarana untuk melapor, menghitung, maupun membayar sendiri pajak yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) (Mardiasmo, 2009:29). Penerapan *self assessment system* dengan cara memberi wewenang penuh kepada WP juga mempunyai risiko ketidakbenaran dalam pengisian maupun pembayaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga dampaknya penerimaan dari pajak tidak optimal. Oleh karena itu dalam administrasi perpajakan juga dikenal adanya pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan adalah suatu proses pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya (Gunadi, *et al.* 2001:51). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak. PPh merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *self assesement system* dan memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *self assessment sytem* yang dilihat dari jumlah SSP dan SPT dan pemeriksaan pajak yang dilihat dari jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap penerimaan PPh secara simultan maupun parsial.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Zain (2008: 10) adalah iuran rakyat kepada negara bagi yang wajib membayarnya menurut undang-undang namun tidak adanya prestasi kembali serta berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran umum negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian PPh

PPh merupakan suatu jenis pajak yang pegenaannya kepada subjek pajak terhadap suatu pendapatan, penerimaan maupun penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pajak (Diana dan Lilis, 2009:163).

Pengertian Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu jenis sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang seharusnya dibayar (Halim, *et al.* 2014:7).

Pemeriksaan Pajak

Suandy (2011:101) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lain dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain.

Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP menurut Resmi (2012:34) adalah surat yang berfungsi sebagai sarana dalam membayar atau dengan kata lain alat yang digunakan untuk menyetor pajak yang seharusnya dibayarkan kepada tempat-tempat yang disahkan sebagai tempat pembayaran pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

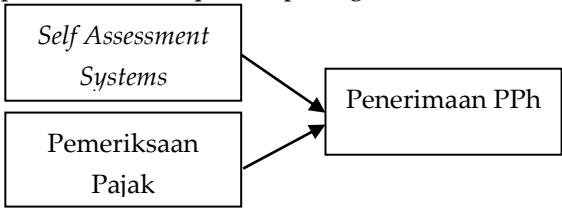
Menurut Mardiasmo (2009:29) SPT adalah sarana untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sebagai sarana pelaporan pajak yang telah dibayarkan

SKPKB dan SKPKBT

Menurut Resmi (2012:41) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah kurang pajak yang telah ditetapkan , sementara SKPKBT adalah surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPKB.

Model Konseptual

Menurut kajian secara teoritis mengenai *self assesement system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh, maka dapat dirumuskan model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis pada gambar 1 berikut:

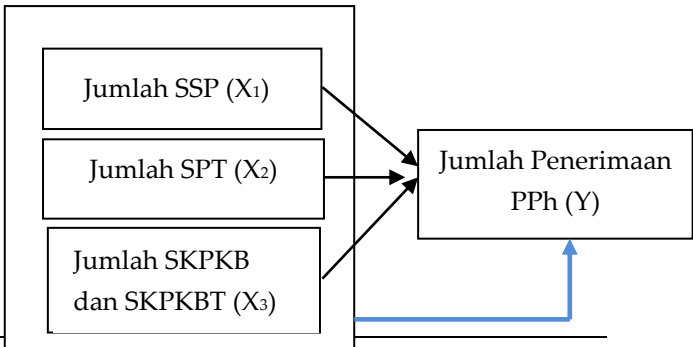


Gambar 1. Model Konsep

Sumber: Data Diolah, 2015

Hipotesis

Model hipotesis dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Hipotesis
Sumber: Data Diolah, 2015
Keterangan:

- : **Berpengaruh secara simultan**
 —————→ : **Berpengaruh secara parsial**
- H₁: jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh secara simultan.
- H₂: jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh secara parsial.

METODE PENELITIAN

Penelitian penjelasan melalui pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana dua aspek atau lebih mempunyai hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya (Widi, 2010:48). Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode statistik deskriptif dan metode statistik inferensial. Jenis data yang digunakan merupakan data *time series*, dimana dari masing-masing variabel diambil data selama 36 bulan terhitung dari bulan januari 2012 sampai dengan desember 2014 di KPP Madya Malang.

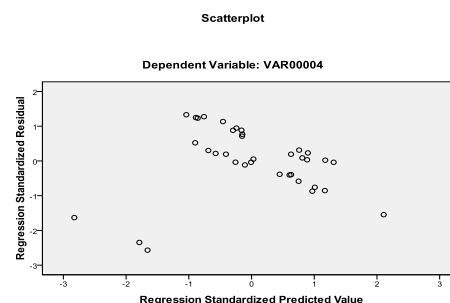
HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis deskriptif didapatkan bahwa dalam periode Januari 2012 sampai Desember 2014 jumlah SSP paling banyak disetorkan yaitu sebanyak 1853 SSP, sedangkan jumlah paling sedikit SSP yaitu sebanyak 750 SSP, untuk rata-ratanya tiap bulan terkumpul sebanyak 1329 SSP. Jumlah SPT paling banyak disampaikan yaitu sebanyak 988 SPT, sedangkan paling sedikit SPT disampaikan yaitu sebanyak 664 SPT, untuk rata-ratanya tiap bulan terkumpul sebanyak 824 SPT. Jumlah SKPKB dan SKPKBT paling banyak diterbitkan yaitu sebanyak 75 SKPKB dan SKPKBT, sementara jumlah paling sedikit yaitu tidak ada SKPKB dan SKPKBT yang terbit, untuk rata-ratanya tiap bulan diterbitkan sebanyak 17 SKPKBT dan SKPKBT. Jumlah penerimaan PPh tertinggi yaitu Rp 154.773.180.324 sementara jumlah terendahnya yaitu sebesar Rp 19.911.362.892, untuk rata-ratanya yaitu sebesar Rp 129.771.974.692,47.

Statistik Inferensial

1. Uji Normalitas
 Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan jenis uji normalitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan, nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,388 atau lebih besar dari nilai α (0,05), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
 Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatter plot*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Diolah, 2015

Hasil pada gambar 3 menunjukkan bahwa penyebaran titik berada di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas
 Nilai *tolerance* dan VIF (*Value Inflation Factor*) merupakan metode yang digunakan untuk melakukan uji multikolinieritas dalam penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

		Collinearity Statistics	
		Toleranc e	VIF
1	X ₁	.924	1.083
	X ₂	.990	1.010
	X ₃	.932	1.073

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 2 nilai VIF dari seluruh variabel bebas < 10 dan nilai Tol > 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi
- Pengujian dengan penggunaan metode Durbin-Watson (uji DW) dilakukan untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi pada penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai d, jika terletak antara dU dan (4-dU) berarti tidak ada autokorelasi. Tabel Durbin-Watson untuk n=36 dan k=3 dengan nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa nilai dU yaitu sebesar 1,295 dan 4-dU sebesar 1,654. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Model	Durbin-Watson
Nilai	1	1.531

Sumber: Data Diolah, 2015

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1,531 yang terletak di antara 1,295 (dU) dan 1,654 (4-dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga lolos uji autokorelasi

Analisis Linier Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda yang diperoleh dengan menggunakan bantuan *software* SPSS didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = - 47222075065 + 72943996 X_1 + 105660859 X_2 - 411653562X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai a (konstanta) bernilai -47.222.075.065 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel X_1 (jumlah SSP), variabel X_2 (jumlah SPT), variabel X_3 (jumlah SKPKB dan SKPKBT) maka penerimaan PPh akan bernilai (-) 47.222.075.065, atau berarti penerimaan PPh mengalami defisit sebesar Rp 47.222.075.065 dengan kata lain fiskus (pemerintah) mempunyai tanggung jawab kekurangan penerimaan dari sektor PPh sebesar Rp 47.222.075.065 atas penerimaan PPh yang bernilai negatif tersebut.
2. Koefisien β_1 sebesar 72.943.996 menunjukkan akan terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh sebesar Rp 72.943.966, jika terjadi kenaikan sebesar satu dari variabel X_1 (jumlah SSP) dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien β_2 sebsar 105.660.859 menunjukkan akan terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh sebesar Rp 105.660.859 , jika terjadi kenaikan sebesar satu dari variabel X_2 (jumlah SPT) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien β_3 sebesar -411.653.562

menunjukkan penerimaan PPh akan mengalami penurunan sebesar Rp 411.653.562, jika terjadi kenaikan sebesar satu dari variabel X_3 (jumlah SKPKB dan SKPKBT) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji F

Penghitungan dengan SPSS untuk uji-F yang didapatkan adalah nilai dari sig.F sebesar 0,005, dimana nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti variabel jumlah SSP (X_1), variabel jumlah SPT (X_2), dan variabel jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan terhadap penerimaan PPh.

Uji t

Berdasarkan hasil penghitungan uji-t yang telah didapatkan menunjukkan bahwa jumlah SSP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial, hal ini dapat dibuktikan dari nilai sig. dari variabel jumlah SSP (X_1) yaitu sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jumlah SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial, hal ini dapat dibuktikan melalui nilai sig. dari variabel jumlah SPT (X_2) yaitu sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jumlah SKPKB dan SKPKBT berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial, hal ini dibuktikan dengan nilai sig. dari variabel jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) adalah sebesar 0,17 yang berarti lebih besar dari 0,05.

PEMBAHASAN

Jumlah SSP, jumlah SPT yang merupakan wujud dari *self assessment system* dan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan wujud dari pemeriksaan pajak diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan terhadap jumlah penerimaan PPh berdasarkan uji-F (uji simultan) yang telah dilakukan. Hasil ini menguatkan teori yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013:6) dimana sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak serta menurut Gunadi, *et al.* (2001:51) yang mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

Jumlah SSP diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh, hal ini didapatkan setelah perhitungan dari uji parsial (uji-t) variabel

jumlah SSP terhadap jumlah penerimaan PPh didapatkan. Hal tersebut menguatkan teori dari (Sudadyo, 2013) yang menyatakan bahwa jumlah SSP memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap jumlah penerimaan PPh.

Jumlah SPT diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh, hal ini dibuktikan dari hasil penghitungan dengan uji parsial (uji-t) variabel jumlah SPT terhadap jumlah penerimaan PPh. Hal tersebut menguatkan teori dari Sudirman (2010) yang menyatakan bahwa jumlah SPT memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap jumlah penerimaan PPh.

Hasil pengujian parsial (uji-t) dari jumlah SSP maupun jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari *self assessment system* menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh, hal ini menguatkan teori dari Tjahjono dan Muhammad (2005:27) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu *self assessment system*.

Jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) diketahui tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT tidak diterbitkan kepada seluruh WP yang terdaftar akan tetapi hanya sebagian WP saja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suandy (2011:131) menyatakan bahwa hanya sebagian saja WP yang dapat diterbitkan SKP, dalam hal ini yaitu WP yang dalam pengisian SPT-nya ditemukan ketidakbenaran atau ditemukan data yang tidak dilaporkan oleh WP.

Penyebab lainnya dikarenakan WP tidak melunasi kekurangan pajak yang tertera di SKPKB dan SKPKBT karena mengajukan upaya hukum yang dapat berupa keberatan atas penerbitan SKPKB dan SKPKBT seperti mengajukan keberatan, seperti yang diungkapkan oleh Ilyas dan Rudi (2013:59) yang menyebutkan bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan, keberatan dan pengurangan/pembatalan atas penerbitan ketetapan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jumlah SSP dan jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari *self assessment system* serta

jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan PPh.

2. Jumlah SSP (X_1), Jumlah SPT (X_2), Jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PPh secara parsial yaitu:
 - a. Jumlah SSP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.
 - b. Jumlah SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.
 - c. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

Saran

1. Saran yang dapat diberikan yaitu agar KPP Madya Malang lebih memperluas cakupan pemeriksaan atas SSP dan SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak (WP) dengan cara tidak hanya berfokus pada WP yang berpotensi melakukan kecurangan, namun juga secara berkala memeriksa SSP dan SPT WP yang lainnya dan menghimbau WP agar memperhatikan cara menghitung ataupun mengisi SSP dan SPT sehingga diharapkan akan meminimalisir kesalahan baik dalam jumlah penyetoran pajak maupun pada pengisian SSP dan SPT dengan cara menggelar penyuluhan rutin tiap bulannya untuk mengedukasi para Wajib Pajak (WP).
2. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu agar lebih memperbanyak variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang juga merupakan produk pemeriksaan pajak sehingga memberikan gambaran pemeriksaan serta untuk peneliti selanjutnya perlu untuk mempertimbangkan cakupan rentang tahun data yang digunakan dalam penelitian yang bervariasi rentangnya supaya memberikan hasil penelitian yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasya dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Gunadi., et al. 2001. *Perpajakan*. Jakarta : LPFE-UI.
- Halim, Abdul., et al. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan dan Rudi Suhartono. 2013. *Perpajakan*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

- Rahayu, Sri Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudadyo, Hanung Tri. 2013. Pengaruh Faktor *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudirman, Putriana. 2010. Pengaruh Faktor *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung-Karees: Bandung. Universitas Widyatama.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Husain. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Wahyuni, Ning. 2013. Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.